

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep/ Teori

1. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan hasil dari Undang-Undang Nomor 71 tahun 2010 adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Adapun definisi Standar Akuntansi Pemerintahan menurut Indra Bastian (2010:134) adalah:

“Standar Akuntansi Pemerintahan,selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia”.

Menurut Mardiasmo (2009:148), standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan, sedangkan prosedur akuntansi merupakan praktik khusus yang telah digunakan untuk mengimplementasikan standar. Standar akuntansi sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan. Tidak adanya standar akuntansi yang memadai akan menimbulkan implikasi negatif berupa rendahnya realibilitas dan objektivitas informasi yang disajikan, inkonsistensi dalam pelaporn keuangan serta menyulitkan dalam pengauditan. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam penetapan standar akutansi, antara lain:

- a) Standar memberikan pedoman tentang informasi yang harus disajikan dalam lapran posisi keuangan, kinejra, dan aktivitas sebuah organisasi bagi seluruh pengguna informasi.

- b) Standar memberikan petunjuk dan aturan tindakan bagi auditor yang memungkinkan pengujian secara hati-hati dan independen saat menggunakan keahlian dan integritasnya dalam mengaudit laporan suatu organisasi serta saat membuktikan kewajarannya.
- c) Standar memberikan petunjuk tentang kumpulan data yang perlu disajikan yang berkaitan dengan berbagai variabel yang patut dipertimbangkan dalam bidang perpajakan, regulasi, perencanaan serta regulasi ekonomi dan peningkatan efisiensi ekonomi serta tujuan sosial lainnya.
- d) Standar menghasilkan prinsip dan teori yang penting bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam disiplin ilmu akuntansi.

Sedangkan menurut Halim (2013:38) menyebutkan bahwa Akuntansi Pemerintahan adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan. Dalam akuntansi pemerintahan, data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah kepada pihak legislatif, yudikatif, dan masyarakat. Lingkup akuntansi pemerintahan adalah:

- a) Akuntansi pemerintahan pusat;
- b) Akuntansi pemerintahan daerah, terdiri atas:
 - 1. Akuntansi pemerintah provinsi;
 - 2. Akuntansi pemerintah kabupaten/kota.

Salah satu usaha untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan Pemerintah.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tersebut, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Definisi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 71 tahun 2010 pasal 1 nomor 3 adalah Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Standar Akuntansi Pemerintahan dimaksud dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Peraturan Pemerintah ini juga merupakan pelaksanaan Pasal 184 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Dari pemaparan mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dapat disimpulkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan prinsip akuntansi yang harus diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah

daerah maupun pusat. Dengan demikian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

2. Ruang Lingkup Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan diterapkan dalam lingkup pemerintahan, yaitu Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Daerah, dan satuan organisasi di lingkungan Pemerintahan Pusat/Daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi yang dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 lampiran 2, maka ruang lingkup yang mencakup Standar Akuntansi Pemerintah yaitu laporan keuangan untuk tujuan umum disusun dan disajikan dengan basis kas menuju akrual/*cash toward accrual*. Pernyataan Standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan suatu entitas pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan laporan keuangan konsolidasian, tidak termasuk perusahaan negara/daerah.

Adapun ruang lingkup Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ini mengacu pada kerangka konseptual yang merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya dapat disebut standar (Nordiawan:2009). Kerangka konseptual ini membahas:

1. Tujuan kerangka konseptual
2. Lingkungan akuntansi pemerintahan
3. Pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna
4. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan
5. Peranan dan tujuan pelaporan keuangan, komponen laporan keuangan, sertadasar hukum

6. Asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan, prinsip-prinsip, serta kendala informasi akuntansi
7. Unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan, pengakuan, dan pengukurannya.

Adanya laporan keuangan adalah untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Setiap entitas pelaporan memiliki kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam kegiatan secara sistematis dan terstruktur dalam suatu periode pelaporan untuk kepentingan (Nordiawan:2009):

a. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, lewat media pertanggungjawaban yang dilakukan secara berkala.

b. Manajemen

Manajemen adalah ilmu seni yang mengatur proses pemanfaatan SDM dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, manajemen akan berguna untuk mengevaluasi pelaksanaan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan serta pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan

menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antar Generasi

Keseimbangan antar generasi bertujuan untuk membantu para pengguna untuk mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e. Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja merupakan proses penilaian yang sistematis dari pekerjaan pegawai dan potensi yang dapat dikembangkan sehingga diharapkan dapat menghasilkan suatu hasil kerja yang tepat guna berdasarkan visi, misi, sasaran serta tujuan yang jelas (mencapai kinerja yang telah direncanakan).

3. Pentingnya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Menurut PP Nomor 24 Tahun 2005, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sudah harus diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan tahun anggaran 2005. Artinya bahwa penyajian laporan keuangan tahun 2005 sudah harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Hal serupa juga terjadi pada penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010, yang menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis AkruaI sudah harus diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan tahun anggaran 2010.

Menurut Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pentingnya Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah sehingga Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di

Indonesia. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mengatur mengenai informasi yang harus disajikan dalam laporan keuangan, bagaimana menetapkan, mengukur, dan melaporkannya. Oleh karena itu, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mengatur penyajian pos-pos yang harus disajikan dalam laporan keuangan seperti pos kas, piutang, aset tetap, dan seterusnya. Laporan keuangan pokok yang wajib disusun dan disajikan oleh entitas pelaporan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Kas Menuju Akrual yaitu sebagai berikut.

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Neraca
3. Laporan Arus Kas (LAK)
4. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Sedangkan, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual mewajibkan entitas pelaporan menyusun dan menyajikan tujuh laporan keuangan pokok yang terbagi ke dalam dua jenis pelaporan, yaitu pelaporan finansial berbasis akrual, pelaporan pelaksanaan anggaran berbasis kas, dan CaLK. Pelaporan finansial terdiri atas:

1. Neraca
2. Laporan Operasional (LO)
3. Laporan Arus Kas (LAK)
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
5. LRA Berbasis Kas, dan
6. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Menurut Halim (2013:39) akuntansi pemerintahan mempunyai beberapa tujuan yaitu:

1. Tujuan pertanggungjawaban, dalam tujuan pertanggungjawaban pemerintah harus memberikan informasi keuangan secara lengkap, memberikan informasi keuangan secara cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat.

2. Tujuan manajerial, dalam tujuan manajerial, memberikan informasi keuangan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja pemerintah adalah tujuan yang diharapkan dapat dicapai dengan adanya akuntansi pemerintah.
3. Tujuan pengawasan, memiliki arti bahwa informasi yang dihasilkan akuntansi pemerintahan harus memungkinkan untuk terselenggarakan pemeriksaan oleh aparat pengawas.

Dari keterangan tersebut di atas, diharapkan dengan adanya akuntansi pemerintahan, mampu membangun hubungan kepercayaan yang baik antara pemerintah baik pusat maupun daerah dengan masyarakat melalui informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat.

4. Karakteristik Kualitatif Pelaporan Sektor Publik

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran- ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi, sehingga dapat memenuhi tujuannya. Karakteristik kualitatif (Indra Bastian: 2010) merupakan perpaduan dari dua kata yakni "karakteristik" yang berarti ciri-ciri dan "kualitatif yang berarti terkait dengan mutu. Dari paduan kata tersebut, dapat disimpulkan bahwa karakteristik kualitatif adalah ciri-ciri khusus dari sebuah mutu.

Karakteristik kualitatif yang terkait dengan informasi akuntansi merupakan ciri khas informasi akuntansi sektor publik yang dihayati dalam proses akuntansi dan berguna bagi pemakai. Jika diimplementasikan pada Akuntansi Sektor Publik, karakteristik kualitatif Akuntansi Sektor Publik adalah ciri khas informasi akuntansi dalam organisasi sektor publik yang berkontribusi pada penentuan kualitas produk setiap unsur Akuntansi Sektor Publik.

Karakteristik kualitatif akuntansi sektor publik dapat digambarkan dalam sebuah hierarki. Manfaatnya bagi pengambil keputusan disajikan sebagai kualitas informasi paling penting. Relevan dan reliabilitas merupakan dua kualitas utama atau pokok beserta unsur-unsurnya yaitu:

- a. Unsur kualitas yang relevan: tepat waktu, nilai prediktif dan nilai umpan balik (*feedback*)
- b. Unsur kualitas reliabilitas: teruji, netralitas, dan menggambarkan kejujuran.

Informasi akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan. Karakteristik kualitatif merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam laporan keuangan sektor publik. Penelitian ini menggunakan unsur Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan (Erlina:2013) unsur-unsurnya, yaitu:

1. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna (dalam Erlina dkk, 2015:11). Menurut PP No 71 Tahun 2010 “Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.”

2. Relevan

Relevan adalah apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi

hasil evaluasi mereka dimasa lalu (dalam Erina dkk, 2015:8). Menurut PP No 71 Tahun 2010 mengemukakan bahwa “Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.” Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan adalah:

a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi di masa lalu.

b. Memiliki manfaat prediktif (*prediktif value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c. Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatar belakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar tidak ada kekeliruan.

3. Andal

Andal adalah apabila informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi (dalam Erina dkk, 2015:9) Menurut PP No 71 Tahun 2010 “Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.” Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

a. Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Dapat diuji kebenarannya (*verifiable*)

Kemampuan informasi untuk diuji kebenarannya oleh orang yang berbeda, tetapi dengan menggunakan metode yang sama, akan menghasilkan akhir yang sama.

c. Netral

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

4. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya (dalam Erina dkk, 2015:10). Menurut PP No 71 Tahun 2010 “Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat

dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.”

Dengan adanya Karakteristik Kualitatif yang ditetapkan sebagai acuan maka laporan keuangan pemerintah pusat/daerah akan lebih berkualitas (dapat dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan) dan laporan tersebut akan diaudit terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diberikan opini dalam rangka meningkatkan kredibilitas laporan, sebelum disampaikan kepada para *stakeholder* antara lain: pemerintah (eksekutif), DPD/DPRD (legislatif), investor, kreditor, dan masyarakat pada umumnya dalam rangka transparansi dan akuntabilitas keuangan negara.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya merupakan penelitian yang lebih dahulu dilakukan oleh peneliti yang lain. Adapun pengambilan tinjauan penelitian terdahulu dilakukan agar dapat membandingkan hasil, objek, subjek dari penelitian sehingga dapat menjadi bahan pembandingan bagi penelitian selanjutnya. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu, dapat dilihat pada tabel 2 penelitian terdahulu meneliti mengenai pengaruh standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan, menggunakan metode kuantitatif yang mempresentasikan seberapa berpengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap kualitas laporan keuangan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini, peneliti membahas mengenai penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam laporan keuangan, menggunakan metode kualitatif yang membahas apakah laporan keuangan DPPKAD Kota Prabumulih sudah menerapkan standar akuntansi pemerintah

dalam penyajian laporan keuangan. Uraian penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

Table 2 Review penelitian terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Arif ardi kusumah (2010)	Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan (survei pada SKPD/OPD pemerintahan kota tasikmalaya).	(1) Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD/OPD Pemerintahan Kota Tasikmalaya baik (2) Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD/OPD Pemerintahan Kota Tasikmalaya baik; (3) Terdapat pengaruh signifikan antara penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan.
2.	Misnawati (2015)	Pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan ketaatan pada peraturan perundangan terhadap kualitas laporan keuangan (Survei pada SKPD Pemerintah Kota Lhokseumawe)	(1) Penerapan standar akuntansi Pemerintah secara parsial berpengaruh positif secara signifikan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pada SKPD Pemerintah Kota Lhokseumawe. Hal ini menunjukkan penerapan standar akuntansi berpengaruh dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan ketersediaan sarana dan prasarana sehingga laporan keuangan dapat diselesaikan dengan baik. (2) Ketaatan pada peraturan perundangan secara parsial berpengaruh positif secara signifikan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pada SKPD Pemerintah Kota Lhokseumawe
3.	Etrin Damayanti (2012)	Analisis Implementasi Basis Akrual pada Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi <i>Cash to Accrual</i> Tahun Anggaran 2007-2009	(1) Masih terdapat beberapa penyajian pos-pos akrual tersebut yang belum memadai, dikarenakan oleh kurangnya peraturan teknis yang detail, dan ketidaksiapan Pemkot Bekasi untuk melaksanakannya.
4.	M. Al Fjrin (2013)	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam menyusun laporan keuangan tahun 2011 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	(1) Penelitian ini mengukur seberapa efektif penerapan SAP di BPKAD. Hasilnya menunjukkan masih kurang efektifnya penerapan baik dalam laporan keuangan maupun aparatur yang membuat laporan keuangan

Sumber : Pustaka elektronik (data diolah tahun 2017)

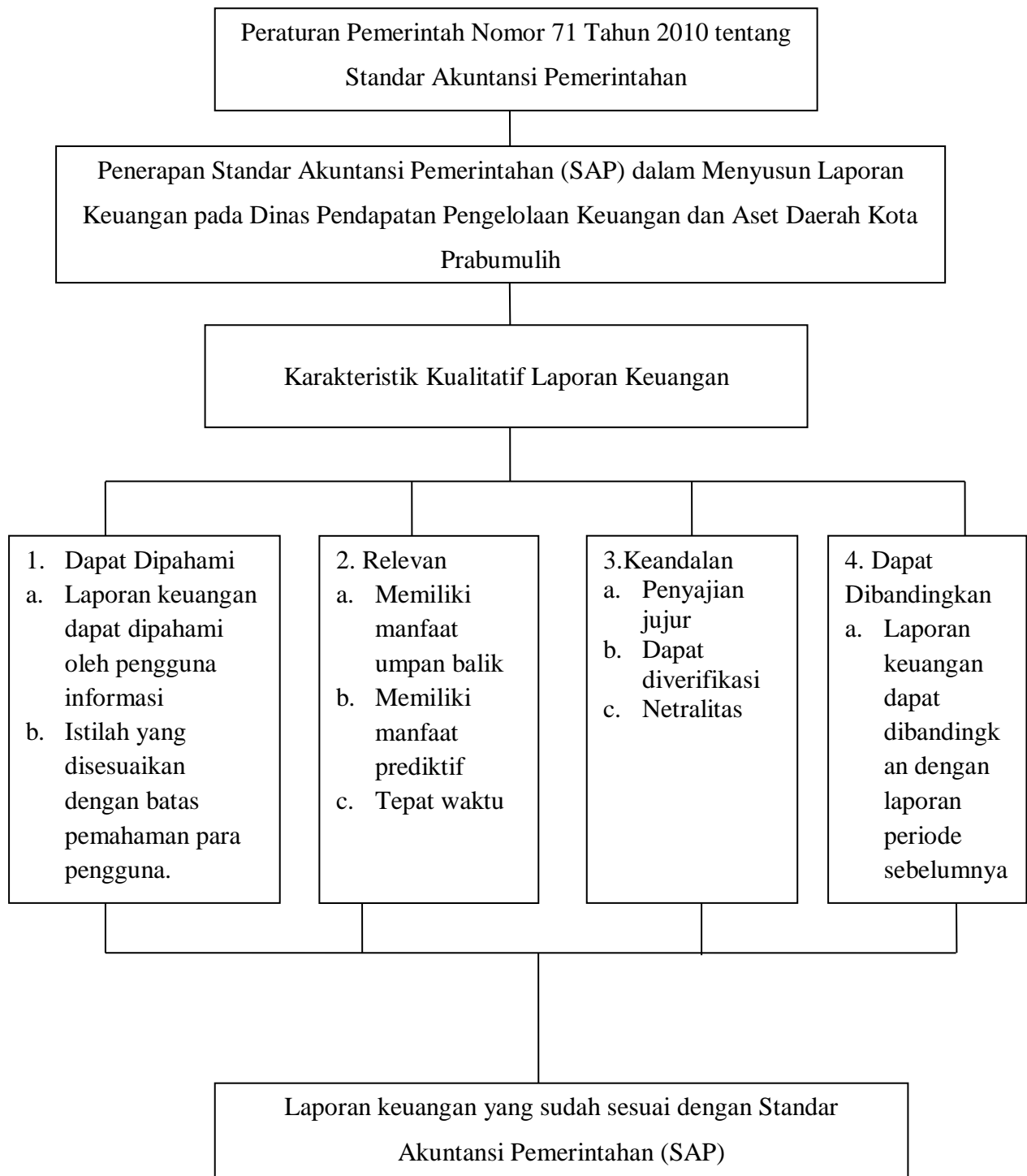
Penelitian yang dilakukan oleh Arif Ardi Kusuma (2010) mengenai Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap Laporan Keuangan di Kota Tasikmalaya menggunakan metode kuantitatif yang dimana hasilnya adalah laporan keuangan pada Pemerintah Kota Tasikmalaya baik dan adanya pengaruh yang signifikan antara standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya. Penelitian yang dilakukan oleh Misnawati (2013) mengenai Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap laporan keuangan pada Pemerintahan Lohseumawe dengan menggunakan metode kuantitatif. Penelitian selanjutnya yaitu yang dilakukan oleh Etrin Damayanti (2012) mengenai Analisis Implementasi Basis AkruaI pada Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi menggunakan metode kualitatif yang hasilnya masih terdapat penyajian pos-pos yang belum memadai dikarenakan kurangnya peraturan teknis yang detail.

Penelitian ini dimaksudkan penulis ingin meneliti mengenai bagaimana penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP) dalam laporan keuangan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kota Prabumulih pada tahun 2015 menggunakan metode penelitian kualitatif.

C. Kerangka Pemikiran

Laporan keuangan yang telah disusun sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual, merupakan tahapan akhir dalam penyajian pertanggungjawaban pemerintah. Berdasarkan penjelasan konsep dan teori sebelumnya maka, skema kerangka pemikiran penerapan standar akuntansi pemerintah dalam menyusun laporan keuangan pada Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Prabumulih dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1 :



Gambar 2 Kerangka Pemikiran

Sumber : Diolah oleh penulis merujuk pada Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan dalam Erlina Tahun 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat (2013:8)

D. Proposisi

Berdasarkan kerangka pemikiran penulis, diduga penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam menyusun laporan keuangan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Prabumulih sudah sesuai berdasarkan 5 aspek karakteristik kualitatif laporan keuangan dalam Erlina, 2013 yakni dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat dibandingkan.